



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEASYWATY

Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JAYADI

Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Plt. kepala Biro Hukum dan
Organisasi



DEASYWATY

Pihak Kedua
Sekretaris
Utama



JAYADI

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|-----|---|---|-------------------------|
| 1. | 01 - Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima | 01 - Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti | 99.7 Persen |
| | | 02 - Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi | 4.7 Nilai |
| | | 03 - Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan | 4 Nilai |
| 2. | 02 - Meningkatnya Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 01 - Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman | 55 Persen |
| 3. | 03 - Tersedianya Kebijakan RB General dan RB Tematik BPOM yang efektif | 01 - Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan | 2 Rekomendasi kebijakan |
| 4. | 04 - Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum | 01 - Indeks Reformasi Hukum | 100 Nilai |
| | | 02 - Persentase Peraturan Perundang- | 100 Persen |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|-----|---|--|------------|
| | | Undangan yang diselesaikan | |
| 5. | 05 - Meningkatnya efektifitas bantuan hukum | 01 - Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti | 100 Persen |
| 6. | 06 - Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal | 01 - Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi | 100 Persen |
| | | 02 - Jumlah Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan | 4 Dokumen |
| | | 03 - Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi | 92.5 Nilai |
| | | 04 - Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar | 100 Persen |
| | | 05 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organsiasi | 100 Persen |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|-----|-------------------------------------|--|-------------|
| | | 06 - Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi | 3.2 Nilai |
| 7. | 07 - Layanan Publik BPOM yang prima | 01 - Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM | 92.75 Nilai |
| | | 02 - Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik | 94.15 Nilai |

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 10.410.240.000 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|---|----------------|
| 1. | WA.4110 - Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana | 10.410.240.000 |

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Plt. kepala Biro Hukum dan
Organisasi



DEASYWATY

Pihak Kedua
Sekretaris
Utama



JAYADI